

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan selama 1 bulan lebih dengan mewawancarai secara mendalam bersama Narasumber dan segenap komponen yang berkaitan dengan judul penelitian ini mengenai Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2018 di Kota Lubuklinggau studi pada DPD PKS Kota Lubuklinggau. Penulis banyak mendapatkan data factual mengenai proses rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses rekrutmen Calon Kepala daerah. hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

A. Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera di DPD PKS Kota Lubuklinggau.

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi calon kepala daerah. Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai konstitusi sebagai dasar hukum berdirinya sebuah Negara yang dikenal dengan undng-undang dasar 1945. Konstitusi ini mengalami beberapa kali amandemen.

Fungsi partai politik di negara demokrasi salah satunya yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan Internalnya, setiap partai politik butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian partai politik dapat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri (Budiardjo,1998.408).

Proses dan strategi politik suatu partai haruslah memiliki *skill* dan daya tarik yang efektif agar bisa mendapatkan simpatik dari masyarakat. Salah satu hal yang menarik untuk di bahas penulis dalam kajian rekrutmen ada pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mana dalam konteks pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 mengenai Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah jalur koalisi partai merupakan bagian terpenting didalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antar partai yang berperan dalam suatu ruang lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai. Hal itu yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan kepala daerah di Kota Lubuklinggau. Proses politik yang dibangun oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau dalam melakukan koalisi partai dilakukan secara teroganisir dan terlembaga dengan baik.

Dalam proses rekrutmen calon kepala daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera di DPD PKS Kota Lubuklinggau ini membuka selebar-lebarnya

pencalonan di Kota Lubuklinggau yang ingin maju di pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 bagi para tokoh politik yang ada di Kota Lubuklinggau baik dari Internal maupun dari Eksternal Partai. Mengacu pada fungsi dari rekrutmen politik, bahwa kelangsungan system politik ini diatur dalam mekanisme penjaringan, penyaringan, dan penetapan calon serta segi elektabilitas, popularitas dan bersih dari hukum.

Berdasarkan AD/ART PKS dalam pemilihan kepala daerah telah tercantum di dalam pasal 57 mengenai perekrutmenan jabatan politik dilingkungan wilayah masing-masing. Dalam hal ini DPD PKS Kota Lubuklinggau memiliki beberapa proses-proses untuk melakukan perekrutmenan calon kepala daerah yang ingin mereka usungkan pada pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tahun 2018. Pada saat pemilihan kepala daerah Tahun 2018 DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Lubuklinggau tidak dapat mencalonkan kadernya sendiri dikarenakan ambang batas dari perolehan kursi DPRD Kota yang di dapat oleh PKS hanya mendapatkan 2 kursi di DPRD Kota atau dibawah dari 20%. Maka dari itu PKS melakukan Rekrutmen calon kepala daerah dari partai lain atau bisa disebut juga dengan berkoalisi dengan partai- partai untuk mencalonkan kepala daerah pada pemilihan pada tahun 2018.

Menurut Suhada selaku Ketua DPD PKS Kota Lubuklinggau, pada saat pencalonan kepala daerah pada tahun 2018, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin mencalonkan kader-kader dari PKS untuk maju kedalam Kontestasi pemilihan kepala daerah pada saat pemilihan kepala daerah. Akan tetapi pada

tahun 2014 DPD PKS Kota Lubuklinggau hanya mendapatkan 2 kursi DPRD sehingga tidak memungkinkan DPD PKS Kota Lubuklinggau untuk mencalonkan kader untuk maju menjadi calon Kepala Daerah. Tetapi Partai Keadilan Sejahtera ingin mencalonkan kadernya ke posisi wakil kepala daerah. Sebelum memutuskan wakil kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera, masih banyak pertimbangan-pertimbangan untuk dicalonkannya kader PKS maju sebagai calon wakil kepala daerah, salah satu hanya mendapatkan 2 kursi DPRD Kota dan juga pada saat itu para calon kepala daerah masih belum membuka peluang untuk mencari wakil kepala daerah (Wawancara Suhada, Tanggal 10 Oktober 2021).

Maka dari itu DPD PKS Kota Lubuklinggau melakukan berbagai survey untuk mengusung calon kepala daerah yang nantinya akan dipilih oleh DPD PKS. DPD PKS Kota Lubuklinggau belum bisa untuk mencalonkan para kader untuk maju, baik sebagai calon Kepala Daerah maupun calon wakil kepala daerah. Aturan yang memberlakukan ambang batas/*Parliamentary Threshold* telah diatur dalam Pasal 40, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

- a. Melalui pengusulan oleh partai politik/gabungan partai politik (koalisi) yang memiliki kursi di DPRD dan memenuhi ambang batas pencalonan (20% kursi DPRD atau 25% suara sah di daerah pemilihan yang bersangkutan).
- b. Melalui jalur perseorangan (Independen) yang dilakukan oleh sejumlah pemilih, disini hanya mengajukan diri untuk maju dalam kontes

pemilihan kepala daerah tanpa di usung oleh partai politik (Fitriyah 2020).

Sesuai dengan dikatakan Merismon selaku wakil ketua DPD PKS Kota Lubuklinggau, untuk mencalonkan Kader DPD PKS terhalangai oleh aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengenai ambang batas kursi yang diperoleh di DPRD Kota. Sebenarnya DPD PKS Kota Lubuklinggau bisa saja untuk mencalonkan wakil kepala daerah akan tetapi calon kandidat Kepala Daerah dari partai lain masih belum membuka peluang untuk mencari wakil kepala daerah yang ingin mendampingi kepala daerah tersebut. Setelah peluang untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari DPD PKS Kota Lubuklinggau sudah tidak bisa, maka DPD PKS Kota Lubuklinggau melakukan proses Rekrutmen calon kepala daerah untuk mereka dukung pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau (Wawancara Merismon, Tanggal 15 Oktober 2021).

Kemudia menurut Rosmala, Pola kaderisasi yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau sangat jauh berbeda dengan pola kaderisasi dengan Partai Politik lainnya. Pola kaderisasi yang dilakukan oleh DPD PKS memiliki beberapa konteks yang berkaitan dengan pembinaan. Pembinaan ini mencakup proses pembelajaran (*ta'lim*), pelatihan keorganisasian (*tanzhim*), pembinaan karakter (*takwin*) dan evaluasi (*taqwin*). Pola pembinaan di Partai PKS yang

paling terkenal adalah pembinaan tarbiyah yang lebih dikenal dengan kegiatan liqo (pertemuan) dan mentoring.

Dalam mencari sosok pemimpin DPD PKS Kota Lubuklinggau tidak melakukan dengan salah pilih. Dalam pembinaan kader ada jenjang-jenjang sendiri didalam pengakderan, seperti kaderisasi mulai dari kader pemula, kader muda, kader madya, kader dewasa, kader ahli, kader purna, dan kader penghormatan. Jadi dalam memilih calon pemimpin PKS memiliki pilihan opsi untuk mecalonkan para kader aslinya untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pada umumnya (Wawancara Rosmala dewi, Tanggal 20 November 2021).

Menurut (Ropik dkk, 2018:276) dalam *Czudnochowski* ada dua model yang digunakan partai politik dalam perekrutmen diantaranya:

- a. Rekrutmen terbuka ialah Rekrutmen terbuka memiliki syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh politik dapat di ketahui secara luas oleh masyarakat.
- b. Rekrutmen tertutup ialah berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka, dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promoter elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri.

Kemudian Menurut Heris Helmi selaku wakil ketua DPD PKS Kota Lubuklinggau, DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Lubuklinggau menggunakan rekrutmen terbuka dan tertutup, yang pertama yaitu menggunakan rekrutmen

tertutup dimana dilakukannya survey internal tingkat ektabilitas di dalam Partai Keadilan Sejahtera terlebih dahulu untuk memajukan para kader PKS yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah atau menjadi wakil kepala daerah, dari sanalah internal DPD PKS Kota Lubuklinggau mencoba untuk memberi peluang terlebih dahulu dan melihat sejauh mana tanggapan masyarakat mengenai para kader DPD PKS Kota Lubuklinggau, seperti diketahui ada beberapa kader dari PKS yang ingin maju dipemilihan kepala daerah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat akan tetapi kembali lagi mengenai kebijakan *Parliamentary Threshold* yang membuat DPD PKS Kota Lubuklinggau masih dibawah ambang batas sehingga para kader PKS tidak bisa maju untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Lalu dengan cara kedua yakni dengan melakukan proses rekrutmen terbuka DPD PKS Kota Lubuklinggau, melalui pengurus-pengurus DPD PKS dan para kader PKS memetakan calon-calon tokoh politik dari luar untuk direkrut untuk mencoba mencari peluang rekrutmen tokoh-tokoh politik yang non kader untuk dicalonkan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau dalam pemilihan kepala daerah. DPD PKS Kota Lubuklinggau melakukan komunikasi ke para tokoh-tokoh politik yang ingin maju di pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau (Wawancara Hennis Helmy, Tanggal 12 Oktober 2021).

Sedangkan menurut Rendra selaku Sekretaris Jendral dari DPD PKS Kota Lubuklinggau mengenai perekrutmenan terbuka dan tertutup, DPD PKS membuka kuota rekrutmen pendaftaran calon dan juga melihat respon dari kader-

kader dari DPD PKS untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan membuka peluang bagi para tokoh-tokoh politik yang non-kader yang mau ikut diusung oleh DPD PKS dalam hal ini juga ada beberapa tahapan untuk mencalonkan diri di DPD PKS bila ingin diusung pada pemilihan kepala daerah tahun 2018. Harapannya dengan menggunakan metode rekrutmen terbuka dan tertutup ini DPD PKS Kota Lubuklinggau bisa menciptakan ruang Demokrasi pada pemilihan kepala daerah di kota lubuklinggau. Dalam penyeleksian DPD PKS Kota Lubuklinggau memiliki tim BP3 (Badan Pemenangan Pemilu Partai), dan melibatkan kader-kader untuk melihat langsung dilapangan dan mensurvei sejauh mana peluang para kandidat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah baik dari internal maupun eksternal (Wawancara Rendra, Tanggal 17 Oktober 2021).

Dari hasil wawancara di atas DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Lubuklinggau melakukan perekrutmen calon kepala daerah di DPD PKS dengan melakukan Rekrutmen terbuka dan tertutup. Sehingga dapat membuka peluang bagi para tokoh politik yang ingin maju dipemilihan kepala daerah serta selalu mengutamakan hal yang baik dari nilai politik dan secara Demokratis. Dengan cara rekrutmen terbuka dan tertutup ini team BP3 yang ditugaskan untuk mensurvey para kandidat-kandidat yang ingin diusung nantinya akan mengetahui hasil survey kemenangan yang ada dilapangan untuk diusungkan menjadi calon Kepala Dearah dan serta selalu mencari karakter akhlak yang baik, bermoral, integritas, memiliki kemampuan memimpin masyarakat yang adil, jujur dan

tentunya menjadi acuan untuk menjabat menjadi kepala daerah dengan realitas yang ada.

Tidak hanya melakukan proses rekrutmen secara terbuka dan tertutup DPD PKS Kota Lubuklinggau juga melakukan tahapan-tahapan proses rekrutmen calon kepala daerah yang mereka usung, tahapan-tahapan tersebut terdiri dari tiga tahapan, tahapan pertama melakukan penjaringan, tahapan yang kedua yakni penyaringan, dan tahapan ketiga yakni penetapan calon kepala daerah. Adapun Menurut (Harris, 2005.19), rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting:

1. Penjaringan calon, dimana tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai ditingkat local atau ranting partai dengan elit partai ditingkat atasannya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Dalam proses rekrutmen atau penyeleksian calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tahap awal yakni, melakukan proses penjaringan calon kepala daerah, kedua penyaringan calon kepala daerah, dan ketiga penetapan calon kepala daerah.

1. Penjaringan Calon Kepala Daerah

Penjaringan yang dilakukan oleh DPD PKS melakukan proses seperti pendaftaran, verifikasi dokumen, survey awal dari team BP3 kepada calon yang ingin mendaftar menjadi calon kepala daerah, dan uji kelayakan dan kepatutan. Dari proses penjaringan ini ada 2 nama calon kandidat yang di usung oleh team BP3 untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, dua kandidat tersebut memiliki kans untuk menang di pemilihan kepala daerah Kota Lubuklinggau, yakni S.N Prana Putra Sohe dan Rustam Effendi yang popularitas suara tertinggi dimasyarakat.

Kemudian Partai PKS mencoba untuk melakukan Komunikasi politik dengan dua kandidat yang dipilih oleh team BP3 PKS untuk diusung di pemilihan kepala daerah. Apabila salah satu dari mereka memiliki keseriusan dengan Partai Keadilan Sejahtera dan memiliki kans yang lebih tinggi untuk menang nantinya akan diusung pada pemilihan kepala daerah. Dari kedua kandidat tersebut yang mana S.N Prana Putra Sohe merupakan Petahana dan Rustam sebagai penantang di pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau, diketahui pada periode pertama dipimpin oleh S.N Prana Putra Sohe sebagai Kepala daerah kemajuan kota Lubuklinggau semakin pesat dan kans kemenangan Prana Putra Sohe untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018 itu masih kuat untuk mengantarkannya maju menjadi orang nomor satu di Kota Lubuklinggau. Sedangkan Rustam Effendi sendiri masih memiliki kans

yang kuat untuk menang dan basis pendukung yang tidak jauh berbeda dengan S.N Prana Putra Sohe.

Berdasarkan nama-nama calon yang sudah disurvei oleh team BP3 dan sudah diverifikasi maka dua kandidat calon tersebut sudah masuk kedalam nominasi calon kepala daerah yang akan di usung di pemilihan kepala daerah tahun 2018. Berdasarkan nama-nama calon kepala daerah oleh tim BP3 DPD PKS Kota Lubuklinggau, Team BP3 masih menganalisis lebih jauh mengenai 2 calon kandidat yang akan direkrut dan diusung pada pemilihan kepala daerah dengan membentuk team analisis *S.W.O.T (strength, weakness, oppourtunity, threat)*.

2. Penyaringan Calon kepala Daerah

Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa rekrutmen keanggotaan merupakan salah satu fungsi dari semua partai politik pada umumnya, dan juga dengan partai politik sebagai tempat bagi penyeleksian pejabat publik seperti anggota legislative kepala daerah baik Walikota/Wakil walikota, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Kepala Negara. Dengan kata lain, partai politik dapat menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang ingin menduduki jabatan politik, tentunya partai politik harus melakukan rekrutmen kader-kader yang terseleksi dengan baik, agar partai betul-betul dapat menjadi “pemasok” pejabat politik yang berkuaitas. Sehingga saat perekrutan calon kepala daerah oleh partai politik haruslah memiliki

kriteria calon yang di inginkan dan yang berlaku dipartai politik dan senantiasa harus di penuhi dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut.

DPD PKS Kota Lubuklinggau dalam hal penyaringan calon kepala daerah memiliki kriteria-kriteria yang akan dilakukan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau untuk menyaring calon kepala daerah yang akan mereka usung pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau.

Sebagaimana juga dikatakan oleh Suhada, Krateria partai PKS untuk mengusung atau mendukung calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sebagai berikut: 1). Memiliki etika, moral yang baik dalam artian baik seorang calon tidak pernah melakukan pelecehan seksual, korupsi, berjudi, dan tidak akan melakukan hal-hal yang negative didepan orang banyak. 2). Memiliki hasil survey yang baik dan bagus untuk memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 3). Harus memiliki kemauan besar untuk bekerja keras memajukan Kota Lubuklinggau. (Wawancara Suhada, Tanggal 10 Oktober 2021).

Dilanjutkan wawancara pula bersama Rendra mengatakan kriteria pencalonan, internal dan exstrnal tentunya tergantung dari integritas dan tetap menjadi salah satu acuan utama, baru setelah itu popularitas sosialitas dan akuntabilitas (Wawancara Rendra, Tanggal 17 Oktober 2021).

Kemudian menurut Haris Helmi, mengenai kriteria itu sangat menentukan sebuah keberhasilan, karena masyarakat akan memilih dan

menginginkan seorang calon yang sangat baik sehingga DPD PKS Kota Lubuklinggau sebagai partai harus memiliki kriteria yang cocok di kalangan masyarakat itu sendiri, salah satunya harus memiliki finansial yang baik, karena sebuah pencalonan sangat membutuhkan finansial yang sangat banyak, bahkan calon yang baik apabila tidak memiliki finansial maka DPD PKS Kota Lubuklinggau tidak berani maju, dan tentunya sebagai calon kita harus memiliki popularitas di kalangan masyarakat, ketenaran dan pribadi yang baik, karena agar dapat menarik sebuah minat masyarakat untuk memilih calon tersebut (Wawancara Heris Helmi, Tanggal 12 Oktober 2021).

Dapat disimpulkan bahwa kriteria yang dimaksud calon kepala daerah yang akan DPD PKS Kota Lubuklinggau usungkan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, harus melihat ideologi dan program yang jelas terhadap masyarakat. Selain program-program yang jelas terhadap masyarakat dan hal itu mampu menarik simpati dari masyarakat.

Dalam pengertian penulis rekrutmen ialah suatu proses dalam memilih seseorang yang handal dalam segala hal untuk memimpin dalam suatu pemerintahan yang akan ia peroleh. Adapun Rekrutmen politik yang lebih memperhatikan sudut pandang fungsionalnya. Sehingga dapat di sampaikan bahwa, segala sesuatu pasti memiliki proses, sehingga di dalam sebuah pemilihan atau perekrutan akan melalui proses-proses penyaringan.

Sebagaimana disampaikan oleh Suhada, dalam mencalonkan atau mendukung kepala daerah DPD PKS Kota Lubuklinggau memiliki proses penyaringan terlebih dahulu untuk menetapkan calon kepala daerah untuk di rekrutmen menjadi kepala daerah nantinya proses yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau dengan membentuk Tim yang bernama Tim Musyarokah terdiri dari 5 orang, dari 5 orang tersebut memiliki peran masing-masing (Wawancara Suhada, Tanggal 10 Oktober 2021).

Sedangkan menurut Haris Helmi, Pertama-tama kandidat memberikan proposal yang telah mereka buat sebelumnya dengan Tim mereka yang akan diserahkan ke DPD PKS Kota Lubuklinggau, lalu anggota Tim DPD PKS Kota Lubuklinggau menerima dan mempelajari proposal terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan Proposal yang mereka buat untuk masa yang akan datang. Ada beberapa kandidat yang ingin di calonkan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau baik dari Kader PKS sendiri maupun dari tokoh Politik lainnya. Selanjutnya DPD PKS Kota Lubuklinggau membuat MoU (Perjanjian) dengan para kandidat yang mengusung diri melalui DPD PKS Kota Lubuklinggau, perjanjian tersebut mengenai Kontrak Politik baik sebelum menjadi Kepala Daerah atau sesudah terpilih menjadi kepala daerah nantinya. Kemudian bila sudah di Usung oleh DPD PKS di pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 dan menang, kontrak politik yang telah dibuat sebelumnya harus dijalankan

dan selalu berkomunikasi terus dengan DPD PKS Kota Lubuklinggau nantinya (wawancara Haris Helmi, Tanggal 12 Oktober 2021).

Lalu menurut Rendra mengenai proses penyaringan rekrutmen calon Kepala Daerah di DPD PKS Kota Lubuklinggau, DPD PKS memiliki cara dalam perekrutmen nya, yang pertama penjaringan, tentunya penjaringan sangat perlu dilakukan karena dalam perekrutmen calon kepala daerah DPD PKS harus melihat terlebih dahulu karakter yang akan di calonkan pada setiap kandidat nya, apakah sama dengan yang DPD PKS harapkan atau tidak. Pada saat penjaringan tentunya DPD PKS selalu terbuka kepada pendaftar yang ingin mendaftar di DPD PKS Kota Lubuklinggau. Maka karena itu DPD PKS melihat dari sifat dan sikap kandidat sebagai calon kepala daerah selepas dari karakter kandidat tersebut, sehingga apabila sudah sesuai dengan harapan kita pada saat penjaringan, maka DPD PKS akan melakukan penyaringan kesetiap calon kepala daerah yang ingin di usung oleh DPD PKS, penyaringan ini dilakukan seperti, visi/misi, program kerja dan juga tujuan bersama pada saat penetapan atau dipilihnya oleh DPD PKS nantinya. Apabila dari beberapa calon telah dipilih oleh DPD PKS maka DPD PKS akan membawa nama mereka ke DPW PKS yang akan di musyawarahkan di dalam rapat internal DPW PKS (Wawancara Rendra, Tanggal 17 Oktober 2021).

Setelah dilakukan rapat interlal oleh DPD dan DPW maka calon yang telah dipilih oleh hasil rapat internal langsung dilaporkan ke pihak DPP PKS selaku dewan pengesahan atau penetapan calon kepala daerah dan di sana lah DPD PKS Kota Lubuklinggau dan DPW PKS Provinsi Sumatera Selatan melakukan komunikasi dahulu mengenai calon tersebut dipilih oleh DPD PKS dan DPW PKS kepada DPP PKS sehingga apabila sudah baik dan di terima oleh DPP, maka DPP akan memberikan mandat berupa Surat Keterangan bahwa calon tersebut sudah di usung oleh semua kalangan Internal partai PKS. Setelah itu langsung di turunkan ke pada DPD PKS Kota Lubuklinggau yang langsung melakukan penetapan calon kepala daerah oleh partai keadilan sejahtera (Wawancara Rendra, Tanggal 17 Oktober 2021).

Sehingga dari perekrutan, aturan, hingga kriteria bahkan proses penyaringan yang sudah terjalankan maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa segala sesuatu bahkan di dalam menjalankan sesuatu harus memiliki aturan dan jalan yang wajib kita lalui, sehingga di titik ini DPD PKS Kota Lubuklinggau juga mengetahui program-program yang akan di jalankan oleh calon kepala daerah yang di usung oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau nantinya.

3. Penetapan Calon Kepala Daerah

Dalam menganalisis calon-calon yang ingin direkrutmen dilapangan muncul beberapa presentase yang memunjukkan banyak dari

para kader untuk mengusung S.N Prana Putra Sohe maju kembali sebagai kepala daerah Kota Lubuklinggau pada tahun 2018 di bandingkan dengan Rustam Effendi sebagai penantang memiliki Presentase dari Kader DPD PKS yang belum bisa menyakinkan kemenangan Rustam Effendi pada saat pemilihan Kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau. Dari hasil presentase para Kader DPD PKS kemudian DPD PKS Kota Lubuklinggau melaporkan ke DPW bahwasanya DPD PKS telah menetapkan dan mengusung S.N Prana Putra Sohe yang mana dia sebelumnya sebagai incumbent di dukung oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau, lalu DPW PKS melakukan rapat internal kembali untuk menetapkan dan melaporkan hasil rapat ke DPP, kemudian DPW PKS membuat SK dukungan mereka terhadap S.N Prana Putra Sohe maju di Pemilihan Kepala Dearah pada tahun 2018 di Kota Lubuklinggau, kemudian melaporkan hasil rapat internal yang mana DPD dan DPW menetapkan SN. Prana Putra Sohe sebagai kandidat yang di usung oleh mereka ke DPP PKS.

DPP PKS di Jakarta mensetujui bahwasanya hasil rapat yang telah digelar merupakan hasil dari bermusyawarah bersama dan tanpa intervensi dari siapapun, akhirnya DPP PKS memberikan Surat Keterangan mengenai pengusungan SN. Prana Putra Sohe maju kembali dalam

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Lubuklinggau kepada DPD PKS Kota Lubuklinggau.

Selanjutnya Haris Helmi, menyampaikan ketika kita sudah bulat menentukan siapa yang akan di usung, makan semua kader sudah siap dan sudah setuju dengan keputusan yang ada, walau ada beberapa kader yang kurang setuju dengan ketetapan yang ada tidak akan bisa di gangu gugat, nama yang kita usung tidak salah dan dapat memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau (Wawancara Haris Helmi, Tanggal 12 Oktober 2021).

Dalam penetapan SN. Prana Putra Sohe sebagai kandidat calon kepala daerah yang diusung oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau, maka dari itu DPD PKS Kota Lubuklinggau memiliki suatu tolak ukur atau progress kedepan nya bersama SN. Prana Putra Sohe untuk menjalankan Pemerintahan yang mana didalam Proposal dan MoU yang telah diajukan kepada DPD PKS Kota Lubuklinggau untuk mendukung bila nanti terpilihnya menjadi Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018. Disisi lain DPD PKS Kota Lubuklinggau telah mengenal dan mengetahui SN. Prana Putra Sohe yang telah lama berkecimpung didunia Perpolitikan Kota Lubuklinggau.

Dari Analisa penulis mengenai proses rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik pada DPD PKS Kota Lubuklinggau, dalam hal penjarangan calon kepala daerah, penyaringan calon kepala daerah, dan penetapan calon

kepala daerah, penulis akan menganalisa bahwasanya dalam merekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan di DPD PKS Kota Lubuklinggau itu melalui beberapa proses, baik dalam pembentukan team BP3 (Badan Pemenangan Pemilu Partai), dan juga Team Analisa S.W.O.T yang beranggotakan para kader-kader partai dan dibentuk oleh para Majelis Permusyawaratan daerah PKS Kota Lubuklinggau dan Ketua DPD PKS beserta struktur penting yang ada di dalam DPD PKS Kota Lubuklinggau.

Setelah Team BP3 dan Team Analisa S.W.O.T terbentuk maka diberikan mandate dan tugas masing-masing untuk menjalankan kewenangan team tersebut. Mandate yang diberikan oleh team BP3 dan Team Analisa S.W.O.T. Kemudian untuk memilih dan menetapkan kepala daerah yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau sesuai dengan AD/ART PKS Pasal 57 yang menjelaskan bahwa dalam perekrutmenan Jabatan Politik oleh partai politik PKS semuanya kembali kepada daerah masing-masing untuk menentukan calon kepala daerah yang akan mereka usung nanti.

Dari hasil dan temuan team BP3 dan Team Analisis S.W.O.T kemudian dilaporkan hasil presentase yang ada di lapangan kepada Team Musyarokah mengenai elektabilitas kemenangan yang ada dimasyarakat mengenai calon yang akan mereka usung nantinya. Team Musyarokah inilah yang akan memberikan rekomendasi kepada pengurus daerah dan pengurus pusat untuk merekrutmen calon yang akan mereka usung nantinya di pemilihan kepala daerah di Kota Lubuklinggau

Suhada selaku Ketua DPD PKS Kota Lubuklinggau menjelaskan bahwasanya, Team Musyarokah DPD PKS Kota Lubuklinggau lah yang memberikan rekomendasi terhadap pengurus daerah dan pengurus pusat yang mana team musyarokah memberikan nama-nama kandidat calon kepala daerah yang akan mereka rekrutmen nantinya. Di sini team musyarokah meminta saran dan melakukan rapat internal dengan pengurus wilayah untuk menentukan calon kandidat yang akan mereka pilih. Kemudian apabila telah menemukan hasil calon kepala daerah yang akan direkrutmen menjadi calon kepala daerah maka team musyarokah DPD PKS Kota Lubuklinggau dan Dewan Pengurus Wilayah PKS di Palembang melaporkan hasil dari rapat yang telah dilakukan dengan cara bermusyawarah kepada Dewan Pengurus Pusat PKS yang berada di Jakarta.

Dari rekomendasi yang dilakukan team musyarokah DPD PKS Kota Lubuklinggau dan DPW PKS di Palembang, maka DPP PKS di Jakarta langsung merekomendasi dan mendukung penuh team musyarokah DPD PKS Kota Lubuklinggau untuk merekrutmen calon kepala daerah yang ada di wilayah mereka sendiri, karena yang mengetahui Peta Politik di Kota Lubuklinggau hanya DPD PKS Kota Lubuklinggau itu sendiri(Wawancara Suhada, Tanggal 10 Oktober 2021).

Dari sini dapat di analisisa dan disimpulkan bahwa Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau yang didalam nya ada team Musyarokah memiliki kewenangan dan keputusan mutlak

untuk memilih kepala daerah yang akan mereka usung nanti nya pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber mengenai Proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau dapat disimpulkan bahwa, DPD PKS Kota Lubuklinggau melakukan Proses Rekrutmen Kepala Daerah melalui beberapa proses, seperti proses cara mengenai perekrutmenan kepala daerah, memberikan peluang kepada para tokoh-tokoh partai politik yang ada di Kota Lubuklinggau untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah dan juga kepada Kader DPD PKS itu sendiri, Berkoalisi dengan Partai-Partai lain untuk mendukung Kepala Daerah yang memiliki elektalibitas tinggi.

DPD PKS Kota Lubuklinggau juga melakukan proses seperti Rekrutmen Terbuka dan Tertutup untuk memilih calon kepala daerah, kemudian melakukan tahapan Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan calon kepala daerah yang diusung pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau.

B. Faktor pendukung dan penghambat dalam Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera di DPD PKS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Lubuklinggau.

a. Faktor pendukung

Rekrutmen Politik juga tidak hanya mengenai suatu pencalonan dari partai politik saja, tetapi rekrutmen berdasarkan kemampuan kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutmenan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu,

distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu dikaji dan di pahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Masyarakat yang ingin mencalonkan harus lah memiliki skill, kecakapan, keahlian untuk terjun ke dunia politik. Karena dunia politik sendiri merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik.

Lalu dalam pencalonan dan menjelang pemilihan tentunya memiliki sebuah komplain dan banyak pendapat orang yang tak suka dengan pandangan dan pilihan kita. Sebagaimana itu selalu menjadi cobaan sekaligus pelajaran berharga dalam sebuah cara dalam menyikapi tanggapan masyarakat dan kader yang ada. Ada beberapa hal yang dapat mendukung dalam proses rekrutmen politik atau calon Kepala Daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Lubuklinggau antara lain

- 1) *Social background*
- 2) *Political socialization*
- 3) *Initial political activity*
- 4) *Occupational variables.*
- 5) *Motivations.*
- 6) *Selection*

Sebelum mencalonkan kepala daerah yang akan di usung, DPD PKS Kota Lubuklinggau melakukan survey terlebih dahulu mengenai enam factor pendukung diatas untuk menetapkan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2018. Ketika keenam factor tersebut ada di dalam satu kandidat yang akan diusung dan telah memenuhi kriteria yang diinginkan dari DPD PKS Kota Lubuklinggau, maka terpilihlah kandidat tersebut untuk diusung pada pemilihan kepala daerah. Karena keenam factor tersebut berpengaruh dalam memilih calon kepala daerah yang akan diusung nanti.

Oleh karena itu diungkapkan oleh Suhada mengenai faktor pendukung, sudah sejauh ini DPD PKS Kota Lubuklinggau berjalan mengenai perekrutan, proses penerimaan, memilih krateria yang cocok, dan hingga banyak sekali komentar baik dan buruk dari kader maupun masyarakat mengenai calon kandidat yang DPD PKS usung pada pemilihan kepala daerah tahun 2018, baik dari faktor pendukung banyak yang mengatakan calon yang di usung DPD PKS SN. Prana Putra Sohe, baik dalam bidang agamis, popularitas, sering bersinambung dengan masyarakat dan selalu bersedia melakukan perjalanan demi mendapatkan suara rakyat, sehingga banyak masyarakat yang menggap bahwa SN. Prana Putra Sohe baik dan masyarakat mendukung, karena meraka beranggapan bahwa seorang pemimpin harus memiliki agama yang baik

dan mampu mengayomi bahkan turun langsung bertemu kepada masyarakat (Wawancara Suhada, Tanggal 10 Oktober 2021).

Disampaikan juga oleh Heris Helmi, bahwa SN. Prana Putra Sohe dalam kepemimpinan nya pada periode pertama Kota Lubuklinggau mengalami kemajuan sangat cepat dan menjadi kota madya yang pertumbuhan pembangunannya sangat baik. Program-program kerja, visi misi SN. Prana Putra Sohe sangat berjalan dengan baik yang mana slogan Linggau BISA (Brain, Inovation, Speech, dan Accountability) membuat masyarakat Kota Lubuklinggau merasakan kemajuan yang dipimpin SN. Prana Putra Sohe yang mana juga program calon yang kita usung ini memiliki program pembangunan masjid yang sangat merata terutama dalam hal perenovasian Masjid Agung As-Salam. Oleh karena itu DPD PKS Kota Lubuklinggau sangat tepat untuk mendukung SN. Prana Putra Sohe untuk maju lagi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Lubuklinggau (Wawancara Heris Helmi, Tanggal 12 Oktober 2021).

Dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Narasumber bahwasanya dalam terpilihnya SN. Prana Putra Sohe untuk maju lagi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang di usung oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau, masyarakat merasa puas dengan perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat meningkat, visi/misi dan program pembangunan Infrastruktur yang ada di Kota Lubuklinggau

seperti hal, pembangunan masjid dan perenovasian Masjid Agung As-Salam di Kota Lubuklinggau dari tahun 2013-2015. Penulis akan memberikan factor pendukung yang jadi penyebab kenapa DPD PKS Kota Lubuklinggau memilih SN. Prana Putra Sohe untuk maju lagi di Pilkada tahun 2018 di Kota Lubuklinggau.



MASJID AGUNG ASSALAM KOTA LUBUKLINGGAU
Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I

SEBELUM DIRENOVASI



SESUDAH DI RENOVASI

b. Faktor penghambat

Dalam kaitannya dengan rekrutmen pejabat publik yang sedang melakukan pecalonan dan akan terus menerus berlangsung di saat pemilihan yang akan diadakan, maka sangat mendesak untuk mengubah paradigma penilaian kualitas SDM (sumber daya manusia) calon kepala daerah untuk sejauh mana kompetisi yang akan di ikut sertakan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam factor penghambat ini DPD PKS Kota Lubuklinggau melakukan beberapa kali survey mengenai calon yang kita usung ini

dikalangan masyarakat, baik mengenai kepribadian, sosialisasinya terhadap masyarakat, akhlak, dan kebijakan-kebijakan yang dia buat.

Dari faktor penghambat, tentunya sangat tidak banyak yang didapatkan penulis dalam mencari penyebabnya akan tetapi juga manusia tidak mungkin luput dari kesalahan baik dari kecil hingga besar, ada beberapa masyarakat yang mengatakan calon yang di usung oleh DPD PKS pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 sering melakukan hal-hal yang menejerumus ke hal-hal yang negative, dan lain sebagainya. Tapi tanggapan tersebut tidak menghakimi dan tidak menghalangi seorang pemimpin untuk maju tanpa ada bukti yang konkret.

Menurut Haris Helmi, SN. Prana Putra Sohe itu berasal dari inkamben, orang melihat dari 2 posisi, karena mereka dapat melihat kinerja pak Nanan, sehingga baik buruknya dapat di lihat dari kinerjanya (Wawancara Heris Helmi, Tanggal 12 Oktober 2021).

Sedangkan menurut Merismon, beliau mengatakan mengenai kandidat SN. Prana Putra Sohe itu dari Inkamben, dan orang juga sudah banyak kenal dengan kandidat yang di usung, jadi saat SN. Prana Putra Sohe melakukan kesalahan maupun kebaikan ya tergantung pada penilainya saja, akan tetapi pada saat itu masih banyak sekali peminat dan pemilih, karena SN. Prana Putra Sohe itu di anggap memiliki kinerja yang baik, sopan santun, dan suka berbicara kepada masyarakat umum, sehingga mereka sangat suka dengan kinerja SN. Prana Putra Sohe, DPD PKS Kota Lubuklinggau melihat hasil kinerja kepemimpinan SN. Prana Putra Sohe selama 1 periode, Kota

Lubuklinggau sekarang maju, pembangunan merata di setiap Kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau (Wawancara Merismon, Tanggal 15 Oktober 2021).

Menurut Rendra Dalam factor penghambat ini sebenarnya tidak banyak yang didapatkan oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau dalam mengusung SN. Prana Putra Sohe untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, akan tetapi factor pengambat yang cukup menarik perhatian DPD PKS mengarah kepada isu-isu mengenai pribadi SN. Prana Putra Sohe yang mana di kalangan masyarakat telah mendapatkan informasi mengenai perilaku masa lalu SN. Prana Putra Sohe yang mana isu tersebut mengandung hal-hal negative yang dapat menurunkan elektabilitas SN. Prana Putra Sohe pada pemilihan kepala daerah tahun 2018, DPD PKS Kota Lubuklinggau sendiri menanggapi hal tersebut, mengenai isu-isu itu bisa juga disebut *Black campaign* (kampanye hitam) kalau hanya sekedar isu-isu tanpa ada bukti yang kuat DPD PKS Kota Lubuklinggau bisa memaklumi hal-hal tersebut karena dengan isu tersebut dapat merusak citra SN. Prana Putra Sohe nantinya. (Wawancara Rendra, Tanggal 17 Oktober 2020).

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber mengenai factor pendukung dan factor penghambat dapat disimpulkan, dari factor pendukung DPD PKS Kota Lubuklinggau memiliki banyak factor pendukung dimana SN. Prana Putra Sohe calon kandidat kepala daerah merupakan seorang *Incumbent* (petahana) yang mana pada periode pertama memimpin Kota Lubuklinggau menjadi Kota Madya yang sangat maju dan memiliki program,

visi dan misi yang banyak didukung oleh masyarakat, kemudian selalu turun kelapangan dan langsung bersosialisasi kemasyarakat.

Kemudian dari factor penghambat, factor ini yang menjadi penghambat dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah oleh DPD PKS Kota Lubuklinggau salah satu nya yaitu mengenai, *Black campaign* (kampanye hitam) yang menyerang pribadi calon kandidat DPD PKS Kota Lubuklinggau untuk menurunkan elektabilitas dan melakukan pecintaraan yang buruk terhadap calon kandidat.